



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pemerintah
Kabupaten Blitar



RENCANA KERJA 2027

KECAMATAN
KANIGORO

Jl. Kota Baru 17
kec-kanigoro@blitarkab.go.id
www.kec-kanigoro.blitarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Renja 2027 Kecamatan Kanigoro dapat disusun dengan baik.

Renja 2027 Kecamatan Kanigoro merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kanigoro selama Tahun Anggaran 2027. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Kanigoro Tahun 2025–2029, Rancangan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2027, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar.

Penyusunan Renja ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan permasalahan yang berkembang di wilayah Kecamatan Kanigoro. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya menjadi salah satu bahan penting dalam penyusunan dokumen ini. Capaian program dan kegiatan yang telah memenuhi target akan terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya, sedangkan capaian yang masih belum optimal menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan melalui penyempurnaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

Dalam penyusunannya, Kecamatan Kanigoro senantiasa berupaya menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, target kinerja perangkat daerah, dan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan maupun keterbatasan anggaran, penyesuaian akan dilakukan dengan tetap mengutamakan program dan kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa Renja 2027 ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Renja 2027 Kecamatan Kanigoro ini dapat menjadi pedoman yang baik bagi seluruh aparatur Kecamatan Kanigoro dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semoga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kecamatan Kanigoro dan mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Blitar.

Blitar, 03 Agustus 2026

Camat Kanigoro



SITI SUPARTIYAH, S.Sos., M.M.

Pembina Tk.I/IV b

NIP. 19681108 198809 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	17
	2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	17
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	26
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	27
	3.3. Program dan Kegiatan Tujuan dan Sasaran Renja PD	28
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	57
	4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027	57
	4.2. Prioritas Program dan Kegiatan	57
	4.3. Pendanaan Program dan Kegiatan	61
	4.4. Indikator Kinerja Program	62
	4.5. Harapan Pelaksanaan Program Tahun 2027	63
BAB V	PENUTUP	65
	5.1. Catatan Penting	65
	5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	66
	5.3. Rencana Tindak Lanjut	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan	7
2.1	Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2026 (tahun berjalan) Kabupaten Blitar	
Tabel	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.2	Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar	
Tabel	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	19
2.3	Kabupaten Blitar	
Tabel	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku	24
2.4	Kepentingan Tahun 2026	
Tabel	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan	32
3.1	Kanigoro Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028	
Tabel	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2027	55
3.2	Dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Blitar	

BAB I

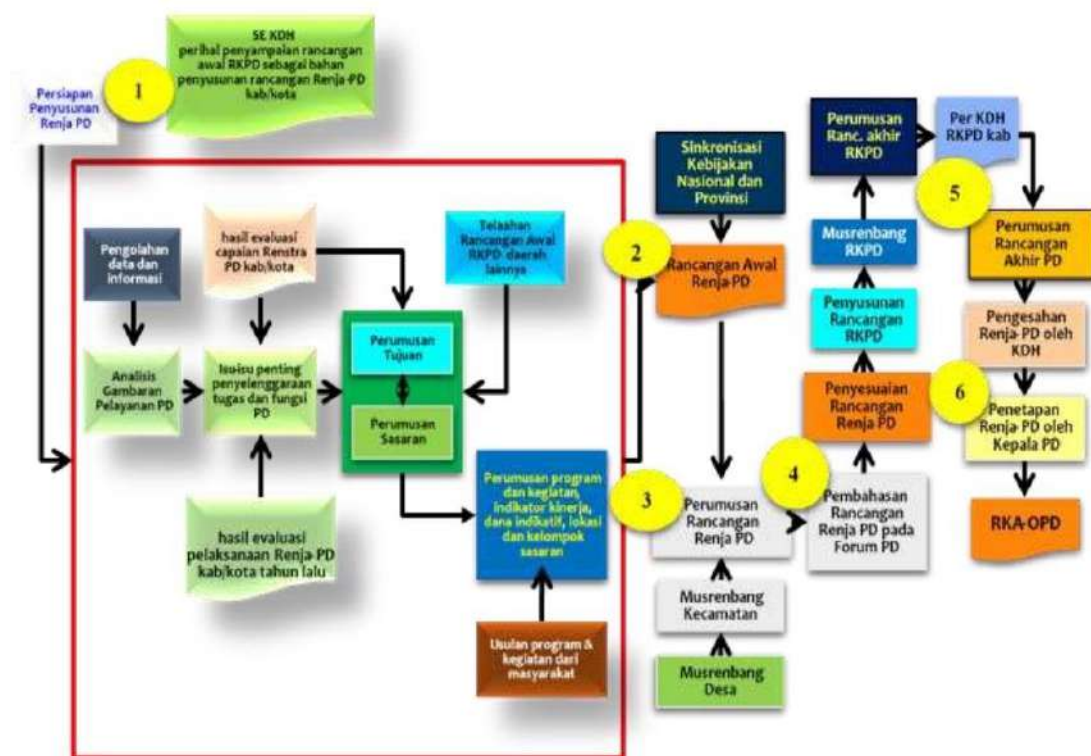
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kanigoro Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Kanigoro dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjenjang, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kanigoro, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kanigoro.

Penyusunan Renja 2027 Kecamatan Kanigoro mengacu pada sistematisa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Blitar tentang Penyusunan Renja 2027 Perangkat Daerah dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disempurnakan dengan mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran Renja Kecamatan Kanigoro. Dokumen ini disusun sebagai penyempurnaan dari rancangan awal Renja setelah memperhatikan hasil pembahasan, sinkronisasi dengan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2027, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dengan alur proses sebagai berikut :

Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di wilayah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

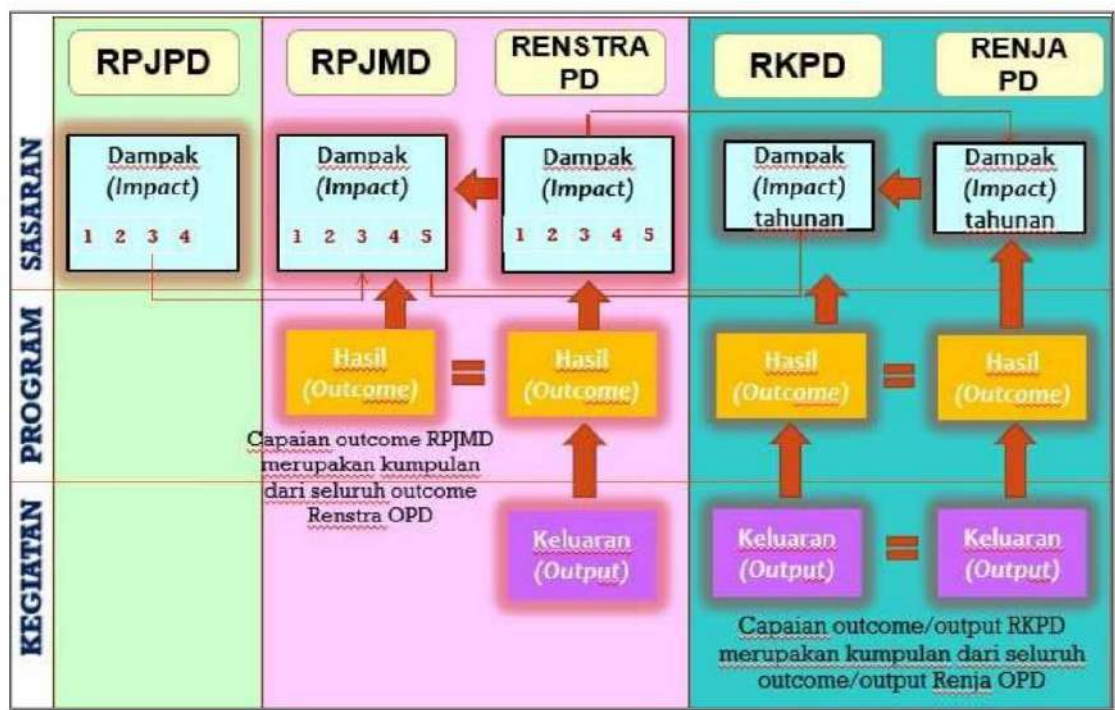
Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian Camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Kecamatan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan yang nyata dari Pemerintah Daerah.

Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran di Kecamatan sudah seharusnya dapat diselesaikan guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan dan Desa. Pemenuhan sumber daya aparatur dan anggaran

yang cukup akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kecamatan.

Penyusunan Renja sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah tentunya tidak lepas dari Rencana Strategis Kecamatan Kanigoro, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kanigoro, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut dijelaskan sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

Berdasarkan gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan mengacu serta bersumber dari Renstra Kecamatan Kanigoro, sehingga arah perencanaan pembangunan perangkat daerah selaras dengan pembangunan di daerah.

Penyusunan Renja merupakan proses awal secara eksplisit merupakan penjabaran terhadap rencana pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kanigoro pada Tahun 2026 dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi Kecamatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan.

Tema pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2027 yaitu "Akselerasi Peningkatan Daya Saing Pertanian yang Berorientasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Didukung Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Berkelanjutan dan Pelayanan Dasar Berkualitas." Tema tersebut menjadi arah pembangunan yang harus didukung oleh seluruh perangkat daerah,

termasuk Kecamatan Kanigoro, melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi pembangunan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sebagai perangkat daerah yang berada pada garis terdepan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Kanigoro memiliki peran penting dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, memfasilitasi pembangunan desa dan kelurahan, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan mudah, serta semakin kompleksnya kebutuhan pembangunan wilayah menjadi tantangan yang harus direspons melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta pengelolaan pemerintahan yang profesional.

Oleh karena itu, Renja 2027 Kecamatan Kanigoro diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, efektif, dan sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja 2027 Kecamatan Kanigoro berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta peraturan perubahannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah 10/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

16. Renstra Kecamatan Kanigoro Tahun 2025–2029;

17. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/050/768/409.3.2/2026 tentang Penyusunan Renja 2027 Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja 2027 Kecamatan Kanigoro dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Kanigoro selama Tahun Anggaran 2027 agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara terarah, terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja 2027 Kecamatan Kanigoro adalah:

1. Menjabarkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Kanigoro.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Kanigoro Tahun Anggaran 2027.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
5. Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja 2027 Kecamatan Kanigoro disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan, isu strategis, review terhadap RKPD, serta penelaahan usulan masyarakat tahun 2025 dan perkiraan capaian

tahun berjalan 2026, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting, review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Kanigoro dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III: Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kanigoro

Bab ini menguraikan kebijakan nasional, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027 sesuai dengan penyusunan Renja sebagai aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan..

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kanigoro

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, serta kebutuhan pendanaan Tahun Anggaran 2027.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi catatan penting, kaidah pelaksanaan, serta tindak lanjut sebagai pedoman pelaksanaan Renja Kecamatan Kanigoro Tahun 2027.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kanigoro merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Renja 2027. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kanigoro pada tahun sebelumnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Sebagian besar program dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan peningkatan kualitas pelaksanaan maupun penyempurnaan pada aspek administrasi dan penganggaran.

Sebagian besar indikator kinerja dapat dicapai melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari sisi pencapaian Renstra Kecamatan Kanigoro Tahun 2025–2029 capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut terlihat dari semakin meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran, terselenggaranya evaluasi kinerja secara berkala, meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat, serta semakin baiknya koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat daerah terkait.

Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang baik antara Kecamatan Kanigoro dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, pemerintah desa, instansi vertikal, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan, meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat, perkembangan regulasi yang cukup dinamis, serta perlunya peningkatan kompetensi aparatur dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut, Kecamatan Kanigoro akan memperkuat kualitas perencanaan berbasis kinerja, meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan Tahun 2027 agar lebih efektif, efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan Kanigoro menunjukkan hasil yang positif dan masih berada pada jalur pencapaian target Renstra Kecamatan Kanigoro Tahun 2025-2029.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2026 (tahun berjalan) Kabupaten Blitar

Nama SKPD: Kecamatan Kanigoro

Lembar 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Dearah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Unsur Kewilayahan									
7.01	Administrasi Pemerintahan (kecamatan)									
7.01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100%	n/a	n/a	n/a
		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80%	80%	80%
7.01 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	80	100	100	100%	n/a	n/a	n/a
		Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang telah dikerjakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	34	14	10
7.01 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	80	100	100	100%	n/a	n/a	n/a
		Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	77	51	29,67
7.01 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	100	100	100	100	100%	n/a	n/a	n/a
		Persentase kecukupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	40	12	11,9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Dearah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	88,24	100	100	100%	n/a	n/a	n/a
		Persentase kecukupan sarana dan Prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9	0	0
7.01 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	n/a	n/a	n/a
		Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	26	14	11,11
7.01 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	100	100	100	100%	n/a	n/a	n/a
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	29	14	42,04
7.01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100	95	100	100	100%	n/a	n/a	n/a
		<i>persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	61%	80%	61%
7.01 02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	12	100	12	12	100%	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	20
7.01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	2	100	100	100%	n/a	n/a	n/a
		<i>persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	20%	100%

7.01 03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	0	0	0	0	0%	n/a	n/a	n/a
		persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12	20
7.01 03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	3	80	3	3	100%	n/a	n/a	n/a
		Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	0
7.01 03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	0	0	0	0%	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24	8	33,33
7 01 03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	0%	n/a	n/a	n/a
		Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	15	30
7.01 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5	80	5	100	20%	n/a	n/a	n/a
		<i>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	40%
7.01 04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4	80	4	4	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14	3	33,33
7.01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan	100	80	100	100	100%	n/a	n/a	n/a
		<i>Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	50%	82%
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	5	80	5	6	120%	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	74	4	11,11
7.01 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah rekomendasi,koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100%	n/a	n/a	n/a
		<i>Persentase desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu,</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%

		<i>Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu, dan Persentase desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu</i>								
7.01 06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan	14	100	14	14	100%	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11	6	25

Sumber: SIPD-Dalev dan Formulir E-81 Kecamatan Kanigoro (data diolah)

Blitar, 03 Agustus 2026
Camat Kanigoro


SITI SUPARTIYAH, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I/IV b
NIP. 19681108 198809 2 002

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kanigoro berjalan dengan baik. Sebagian besar indikator kinerja telah memenuhi target yang direncanakan, terdapat indikator yang belum sepenuhnya mencapai target, dan terdapat pula capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat indikator kinerja yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu capaian yang masih memerlukan perhatian terdapat pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan indikator Persentase kecukupan sarana dan Prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik dan Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Target yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai, dengan tingkat realisasi sebesar 0%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian layanan yang belum dapat mencapai tingkat capaian sebagaimana yang diharapkan.

Belum tercapainya target tersebut perlu menjadi perhatian karena efisiensi anggaran merupakan salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan akan mendukung kelancaran pelaksanaan sarana prasarana dan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang optimal.

Ke depan, Kecamatan Kanigoro perlu melakukan identifikasi secara lebih rinci terhadap jenis layanan yang belum mencapai target, meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian administrasi, memperbaiki pengelolaan data, serta meningkatkan koordinasi antara pengelola barang dengan seluruh aparatur.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan

Sebagian besar program dan kegiatan Kecamatan Kanigoro Tahun 2026 telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target penyusunan dokumen telah terealisasi sebesar 10%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pula pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target penyusunan laporan administrasi keuangan telah tercapai 29,67%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan telah dilaksanakan secara tertib dan mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Administrasi Umum Perangkat Daerah juga telah mencapai target 11,9%. Pelayanan administrasi umum, penyediaan kebutuhan operasional, serta dukungan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.

Pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah juga telah mencapai target 11,11%. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah juga telah mencapai target 42,04% telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat telah mencapai 80%. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat juga telah dilaksanakan sesuai target.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan juga menunjukkan capaian sesuai target. Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa telah dilaksanakan sebanyak 20 kali atau mencapai 100% dari target.

Selanjutnya, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah memenuhi target yang ditetapkan. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum terlaksana sebanyak 3 kali.

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa mencapai target 6 dokumen atau 100%. Pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pemerintahan desa juga terlaksana sesuai target.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan mampu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan

Selain kegiatan yang memenuhi target, terdapat capaian indikator yang melebihi target yang direncanakan. Salah satu capaian tersebut terlihat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Target rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah ditetapkan sebesar 80%, sedangkan realisasi capaian mencapai 80%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program penunjang dapat berjalan lebih baik dibandingkan target yang telah ditetapkan.

Capaian di atas target tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya peningkatan volume seluruh kegiatan, tetapi lebih mencerminkan adanya beberapa indikator kegiatan yang dapat dilaksanakan secara optimal sehingga memberikan kontribusi terhadap rata-rata capaian kinerja program.

Capaian tersebut perlu dipertahankan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kinerja yang telah baik juga perlu dijadikan contoh dalam meningkatkan capaian indikator lainnya yang masih belum optimal.

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya, atau Melebihi Target Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pencapaian target kinerja Kecamatan Kanigoro Tahun 2026.

A. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan.
2. Koordinasi yang baik antara Kecamatan Kanigoro dengan perangkat daerah terkait dan pemerintah desa.
3. Tersedianya dukungan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas.
4. Adanya perencanaan dan penjadwalan kegiatan yang cukup baik.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan secara berkala.
6. Dukungan pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kewilayahan.

B. Faktor Penghambat

Sementara itu, beberapa faktor yang menyebabkan masih terdapat target yang belum tercapai secara optimal antara lain:

1. Adanya dinamika kebutuhan pelayanan masyarakat yang berubah selama tahun berjalan.
2. Perubahan kebijakan dan regulasi yang membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa fungsi pelayanan.
4. Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan administrasi dan data kepegawaian.
5. Keterbatasan kemampuan anggaran dibandingkan dengan keseluruhan kebutuhan pelayanan.
6. Adanya kegiatan yang pelaksanaannya bergantung pada koordinasi dengan pihak lain.

2.1.5. Implikasi terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 memberikan gambaran terhadap posisi pencapaian target Renstra Kecamatan Kanigoro Tahun 2025–2029.

Capaian sebagian besar program yang telah memenuhi target memberikan dampak positif terhadap pencapaian sasaran Renstra. Konsistensi pencapaian target pada kegiatan perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, administrasi umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa menjadi modal penting untuk mencapai target Renstra sampai dengan Tahun 2029.

Namun demikian, indikator yang belum mencapai target, khususnya pada pelayanan pengadaan barang milik daerah dan kegiatan pemberdayaan kelurahan, perlu mendapatkan perhatian agar tidak memberikan dampak terhadap pencapaian target Renstra pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian, hasil evaluasi Tahun 2026 tidak hanya digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi dasar untuk memastikan bahwa target Renstra Kecamatan Kanigoro Tahun 2025–2029 tetap dapat dicapai secara bertahap dan konsisten.

2.1.6. Kebijakan dan Tindakan Perencanaan serta Penganggaran yang Perlu Diambil

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, beberapa kebijakan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam penyusunan Renja Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan program dan kegiatan yang telah memenuhi target, dengan tetap meningkatkan kualitas output dan manfaatnya bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pengadaan barang milik daerah dan kegiatan pemberdayaan kelurahan, terutama pada aspek ketepatan waktu, kelengkapan data, dan penyelesaian layanan administrasi sehingga capaian dapat meningkat dari 0 % menjadi sesuai target yang ditetapkan.
3. Memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga potensi ketidaktercapaian target dapat diketahui lebih awal dan segera dilakukan langkah perbaikan.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja, dengan memastikan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan memiliki indikator yang jelas, terukur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Memprioritaskan penganggaran terhadap kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian indikator Renstra, terutama indikator yang capaian kinerjanya masih perlu ditingkatkan.
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah, pemerintah desa, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan keterlibatan bersama.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas, kecepatan, serta akurasi pelayanan.
8. Apabila terjadi keterbatasan anggaran, maka prioritas diberikan kepada kegiatan yang bersifat wajib, mendukung pelayanan publik, memenuhi target Renstra, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil evaluasi tersebut, pelaksanaan Renja Kecamatan Kanigoro Tahun 2026 dapat dinilai berjalan dengan baik, dengan sebagian besar target telah tercapai dan beberapa indikator bahkan menunjukkan capaian di atas target. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Renja Tahun 2027 dengan tetap

mempertahankan capaian yang telah baik, memperbaiki indikator yang belum optimal, dan memastikan kesinambungan pencapaian target Renstra Kecamatan Kanigoro Tahun 2025–2029.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kanigoro mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama pelaksanaan tugas tersebut, kualitas pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan melalui meningkatnya ketepatan waktu pelayanan administrasi, semakin baiknya koordinasi dengan pemerintah desa, serta meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan.

Pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan kecamatan dapat diselesaikan sesuai standar pelayanan. Selain itu, pelaksanaan fasilitasi Musrenbang, pembinaan desa, koordinasi pembangunan wilayah, pembinaan kelembagaan masyarakat, serta pelayanan administrasi pemerintahan juga berjalan dengan baik.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek pelayanan yang perlu terus ditingkatkan, khususnya pada percepatan digitalisasi pelayanan, peningkatan kualitas sarana pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi penyediaan data pembangunan yang akurat dan terintegrasi.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	88,24	89,24	89,50	90,50	100%	100%	89,50	90,50	
2	Nilai SAKIP	-	-	62,60	62,90	63,00	63,45	62,45	59,14	63,00	63,45	Realisasi tahun 2025 sebesar 62,45 masih di bawah target 62,60, sedangkan tahun 2026 realisasi 59,14 dibawah target 62,90. Hal ini menunjukkan adanya potensi penurunan, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penguatan penerapan manajemen kinerja agar target nilai 63 pada tahun 2027 dapat tercapai.
3	Persentase Desa Mandiri	-	-	70%	80%	90%	100%	70%	80%	90%	100%	Target peningkatan Desa Mandiri menunjukkan nilai positif, dari 70% pada tahun 2025 menjadi 90% pada tahun 2027. Realisasi tahun 2025 sebesar 70% telah sesuai target dan tahun 2026 mencapai 80% juga sesuai target. Perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada desa agar peningkatan status desa dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
4	Angka Kriminalitas di Kecamatan	-	-	7,36	6,14	4,91	3,68	13	6,14	4,91	3,68	Target angka kriminalitas direncanakan menurun dari 7,36 kejadian pada tahun 2025 menjadi 4,91 kejadian pada tahun 2027. Namun, proyeksi menunjukkan nilai peningkatan dari 13 kejadian tahun 2025 menjadi 4 kejadian tahun 2027. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan dilakukan evaluasi terhadap data serta strategi pengendalian kriminalitas melalui peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat.
5	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	-	-	n/a	90	91	92	n/a	90	91	92	Target menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran secara bertahap. Capaian 90% pada tahun awal perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui peningkatan kecepatan, ketepatan, transparansi, serta kemudahan pelayanan administrasi. Perlu dilakukan evaluasi kepuasan pegawai secara berkala sebagai dasar perbaikan pelayanan internal.
6	Persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik (%)	-	-	60	61	62	63	80	80	62	63	Target meningkat secara bertahap dari 60% menjadi 63%, yang menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, apabila dibandingkan dengan capaian sebesar 80%, terdapat capaian yang telah melampaui target. Kondisi tersebut perlu dipertahankan melalui peningkatan kompetensi aparatur, pemenuhan standar pelayanan, penguatan sarana-prasarana, serta optimalisasi pelayanan berbasis teknologi informasi.
7	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	-	-	90	92	94	96	100	100	94	96	Target meningkat dari 90% hingga 96%, sedangkan capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat telah terlaksana secara optimal dan melampaui target. Ke depan, fokus tidak hanya pada kuantitas fasilitasi tetapi juga kualitas, efektivitas, keberlanjutan kegiatan, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar manfaat pemberdayaan dapat dirasakan secara nyata.
8	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	-	-	50	40	30	20	80	80	30	20	Target persentase mengalami penurunan dari 50% menjadi 20%. Hal ini perlu dicermati karena secara prinsip indikator penyelesaian gangguan Trantibum semakin tinggi semakin menunjukkan kinerja penyelesaian yang baik. Apabila angka tersebut dimaksudkan sebagai target gangguan yang tersisa/belum terselesaikan, maka penurunan merupakan kondisi positif. Namun, apabila merupakan persentase gangguan yang dapat diselesaikan, perlu dilakukan peninjauan kembali formulasi indikator dan target agar konsisten dengan

												orientasi peningkatan kinerja.
9	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	-	-	81	82	83	84	78	100	83	84	Target meningkat secara bertahap hingga 84%. Dengan capaian 100%, pelaksanaan fasilitasi telah melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan efektivitas koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum. Selanjutnya perlu dipertahankan melalui koordinasi lintas sektor, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap permasalahan pemerintahan di wilayah kecamatan.
10	Persentase Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Target 100% menunjukkan bahwa seluruh desa di wilayah kecamatan diharapkan mampu menetapkan RKPDDes sesuai tahapan dan batas waktu yang telah ditentukan. Capaian 100% menunjukkan target telah terpenuhi. Kinerja ini perlu dipertahankan melalui pembinaan, fasilitasi penyusunan, monitoring jadwal, serta koordinasi dengan pemerintah desa agar tidak terjadi keterlambatan pada tahun berikutnya.
	Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu (%)											Target 100% menunjukkan komitmen untuk memastikan seluruh desa menetapkan APBDDes tepat waktu. Capaian 100% menunjukkan target telah terpenuhi. Untuk mempertahankan capaian tersebut diperlukan monitoring tahapan penyusunan APBDDes, fasilitasi terhadap desa yang mengalami kendala, serta koordinasi dalam proses evaluasi dan penetapan.
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu (%)											Target dan capaian 100% menunjukkan seluruh desa telah mampu memenuhi kewajiban penetapan LPPDes tepat waktu. Kondisi ini perlu dipertahankan melalui pembinaan administrasi pemerintahan desa, monitoring penyusunan laporan, serta penguatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban.

Sumber: Renstra Kec. Kanigoro 2025-2029 (data diolah)

Blitar, 03 Agustus 2026

Camat Kanigoro



SITI SUPARTIYAH, S.Sos., M.M.

Pembina Tk. I/IV b

NIP. 19681108 198809 2 002

Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan kinerja yang baik, ditandai dengan beberapa capaian yang telah memenuhi bahkan melampaui target, khususnya pada fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Sementara itu, indikator ketepatan waktu penetapan RKPDes, APBDes, dan LPPDes telah mencapai 100% sehingga perlu dipertahankan secara konsisten.

Hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah indikator gangguan Trantibum, karena target menunjukkan nilai menurun dari 50% menjadi 20%. Apabila indikator tersebut dimaknai sebagai persentase gangguan yang dapat diselesaikan, maka target perlu dievaluasi agar sejalan dengan prinsip peningkatan kinerja. Selain itu, capaian pelayanan kecamatan yang mencapai 80% perlu dijadikan dasar untuk meningkatkan target periode berikutnya secara lebih realistis dan progresif. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum pada sasaran renstra yang mengandung maksud bahwa jika angka kriminalitas di kecamatan semakin menurun maka ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan meningkat.

Implikasi terhadap perencanaan dan penganggaran: penganggaran selanjutnya perlu memprioritaskan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penanganan Trantibum, koordinasi pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Indikator yang telah mencapai 100% tetap perlu didukung anggaran yang proporsional untuk menjaga keberlanjutan kinerja, sedangkan indikator yang masih memiliki ruang peningkatan perlu memperoleh intervensi dan dukungan anggaran yang lebih terarah.

Kinerja pelayanan Kecamatan Kanigoro dianalisis berdasarkan capaian indikator pelayanan sesuai tugas dan fungsi kecamatan. Selama tahun berjalan, pelayanan administrasi kepada masyarakat dapat diselesaikan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, koordinasi pembangunan wilayah, pembinaan desa, serta fasilitasi berbagai kegiatan pemerintahan juga berjalan dengan baik berkat kerja sama antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait.

Di sisi lain, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan peningkatan, terutama pengembangan pelayanan berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur, pembaruan sarana pelayanan, serta penguatan sistem pengelolaan data sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kanigoro terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian pada Tahun 2027.

- Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi informasi.
- Perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang berkualitas.
- Pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan perubahan regulasi.
- Optimalisasi pengelolaan data statistik sektoral sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan yang tepat sasaran untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.
- Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta penyederhanaan proses pelayanan.
- Keterbatasan anggaran yang mengharuskan penentuan prioritas program dan kegiatan secara lebih efektif.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan Kecamatan Kanigoro telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hasil penelaahan, program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Kanigoro secara umum telah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Penyesuaian yang dilakukan lebih diarahkan pada penyempurnaan target kinerja, penyelarasan indikator, penyesuaian pagu indikatif, serta penyempurnaan nomenklatur kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Program yang diprioritaskan tetap berfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, penguatan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan, pengelolaan data statistik sektoral, peningkatan kualitas aparatur, serta pembinaan pemerintahan desa.

Hasil review menunjukkan bahwa usulan program dan kegiatan Kecamatan Kanigoro telah mendukung tema pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2027 sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja 2027 Kecamatan Kanigoro.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Kanigoro	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	91%	4.144.347.449,38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Kanigoro	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	91%	3.621.099.880,00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kanigoro	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Kegiatan	6.688.605,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kanigoro	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Kegiatan	6.610.000,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kanigoro	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88 Kegiatan	3.115.504.166,38	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kanigoro	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88 Kegiatan	3.060.146.800,00	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kanigoro	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 Kegiatan	180.308.472,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kanigoro	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 Kegiatan	43.504.980,00	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kanigoro	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Unit	196.660.963,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kanigoro	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	10.629.700,00	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kanigoro	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27 Kegiatan	410.354.492,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kanigoro	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27 Kegiatan	456.836.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kanigoro	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	42 Kegiatan	117.376.613,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kanigoro	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	42 Kegiatan	43.371.600,00	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Kanigoro	Persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik	100%	50.118.626,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Kanigoro	Persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik	100%	3.500.000,00	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kanigoro	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	13.781.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kanigoro	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	3.500.000,00	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Kanigoro	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	1.997.641.800,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Kanigoro	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	1.215.989.920,00	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kanigoro	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 Kegiatan	21.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kanigoro	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 Kegiatan	9.996.920,00	
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Kanigoro	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8 Kegiatan	1.800.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Kanigoro	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan	8 Kegiatan	1.200.000.000,00	
3.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Kanigoro	Terkoordinasinya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24 Kegiatan	12.600.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Kanigoro	Terkoordinasinya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24 Kegiatan	450.000,00	
3.4	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Kanigoro	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Kegiatan	24.000.000,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Kanigoro	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Kegiatan	5.543.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kec. Kanigoro	Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan	100%	57.200.170,00	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kec. Kanigoro	Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan	100%	13.187.000,00	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kanigoro	Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Kegiatan	53.800.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kanigoro	Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Kegiatan	13.187.000,00	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Kanigoro	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	24.456.863,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Kanigoro	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	5.000.000,00	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kanigoro	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24 Kegiatan	24.456.863,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kanigoro	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24 Kegiatan	5.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kanigoro	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	31.095.225,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kanigoro	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	728.771.000,00	
		Kec. Kanigoro	PersentaseDesa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%			Kec. Kanigoro	PersentaseDesa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%		
		Kec. Kanigoro	PersentaseDesa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%			Kec. Kanigoro	PersentaseDesa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%		
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kanigoro	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10 Kegiatan	31.095.225,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kanigoro	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10 Kegiatan	728.771.000,00	

Blitar, 03 Agustus 2026

Camat Kanigoro



SITI SUPARTIYAH, S.Sos., M.M.

Pembina Tk. I/IV b

NIP. 19681108 198809 2 002

Hasil review menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan telah mendukung tema pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2027, terutama dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia/aparatur desa, pengembangan sistem informasi pemerintahan, dan peningkatan kualitas data statistik sektoral.

Beberapa penyesuaian dilakukan terhadap target kinerja, indikator, nomenklatur kegiatan, serta pagu indikatif agar selaras dengan hasil pembahasan RKPD dan kemampuan keuangan daerah, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.1. Catatan Penting Penyelarasan Ranwal dan Analisis Kebutuhan

No	Program/Kegiatan	Kondisi Ranwal	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program telah direncanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kanigoro	Masih diperlukan dukungan optimal terhadap administrasi, perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana.	Program tetap diperlukan dan perlu diselaraskan dengan kebutuhan riil perangkat daerah serta target kinerja Renstra Tahun 2025–2029.	Menyesuaikan target dan kebutuhan anggaran berdasarkan prioritas Tahun 2027.
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan telah direncanakan sesuai ketentuan.	Diperlukan peningkatan kualitas penyusunan dokumen agar lebih tepat waktu, akurat dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah.	Perlu penguatan konsistensi antara Renstra, Renja, RKPD, KUA-PPAS, RKA dan dokumen pelaporan kinerja.	Melakukan reviu target, jadwal dan kebutuhan pendukung penyusunan dokumen Tahun 2027.
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan telah direncanakan untuk mendukung pengelolaan keuangan perangkat daerah.	Kebutuhan administrasi dan pengelolaan keuangan tetap diperlukan untuk menjamin tertib administrasi.	Perlu memastikan kesesuaian kebutuhan dengan standar harga, ketentuan yang berlaku dan pagu indikatif.	Melakukan rasionalisasi kebutuhan belanja sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor.	Kebutuhan operasional masih diperlukan guna mendukung kelancaran pelayanan administrasi.	Perlu dilakukan efisiensi serta penyesuaian dengan kebutuhan riil.	Melakukan inventarisasi dan rasionalisasi kebutuhan operasional.
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana telah direncanakan sesuai kebutuhan awal.	Diperlukan pemenuhan sarana prasarana berdasarkan kondisi barang dan kebutuhan pelayanan.	Pengadaan diprioritaskan untuk barang yang benar-benar mendukung pelayanan dan mengganti sarana yang tidak layak.	Melakukan inventarisasi kondisi BMD dan menentukan skala prioritas pengadaan.
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telah direncanakan untuk mendukung operasional dan pelayanan Kecamatan.	Jasa penunjang tetap dibutuhkan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.	Perlu penyesuaian kebutuhan berdasarkan volume dan standar yang berlaku.	Menghitung kembali volume kebutuhan dan kebutuhan anggaran Tahun 2027.
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan kendaraan, peralatan dan bangunan telah direncanakan.	Diperlukan pemeliharaan rutin dan berkala untuk menjaga kondisi sarana prasarana.	Prioritas diberikan pada aset yang mendukung langsung pelayanan kepada masyarakat.	Melakukan pendataan kondisi aset dan menetapkan prioritas pemeliharaan.

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program telah direncanakan untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.	Masih diperlukan peningkatan kualitas, kecepatan, kemudahan akses dan kepuasan terhadap pelayanan publik.	Program menjadi prioritas dalam mendukung sasaran peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat.	Menyesuaikan target pelayanan Tahun 2027 dengan target tahunan Renstra Kecamatan Kanigoro.
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Telah direncanakan sesuai kewenangan Kecamatan.	Diperlukan optimalisasi fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan.	Pelaksanaan perlu memperhatikan kewenangan, kebutuhan masyarakat dan efektivitas pelayanan.	Melakukan penyesuaian target dan volume kegiatan berdasarkan kebutuhan wilayah.
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program telah tercantum dalam Ranwal sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pemberdayaan di wilayah kecamatan.	Diperlukan penguatan pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterlibatan masyarakat.	Perlu memastikan kegiatan dan anggaran benar-benar mendukung pencapaian indikator kinerja program serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan hasil evaluasi tahun sebelumnya.	Menyelaraskan indikator, target, kegiatan, subkegiatan, serta kebutuhan anggaran dengan prioritas pembangunan dan hasil analisis kebutuhan masyarakat/desa/kelurahan.
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi pemberdayaan desa telah direncanakan melalui fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta pemangku kepentingan terkait.	Dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif untuk menyinergikan program pemberdayaan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menghindari tumpang tindih kegiatan antar-OPD/desa.	Koordinasi perlu diarahkan pada penyelesaian permasalahan prioritas desa dan penguatan sinergi antara kecamatan, pemerintah desa, kelembagaan masyarakat, dan perangkat daerah terkait.	Meningkatkan forum koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan desa serta menyusun dokumentasi hasil koordinasi sebagai bahan perencanaan berikutnya.
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan pemberdayaan kelurahan telah direncanakan untuk mendukung peningkatan	Diperlukan pemberdayaan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelompok masyarakat, serta peningkatan partisipasi dalam	Kegiatan perlu mempertimbangkan karakteristik dan permasalahan masing-masing kelurahan serta diarahkan untuk menghasilkan	Melakukan identifikasi kebutuhan masing-masing kelurahan, menetapkan prioritas kegiatan, meningkatkan fasilitasi masyarakat,

		kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan.	perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelurahan.	manfaat yang terukur bagi masyarakat.	serta melakukan monitoring terhadap hasil pemberdayaan.
3.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Ranwal telah mengakomodasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sebagai bagian dari penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.	Lembaga kemasyarakatan membutuhkan peningkatan kapasitas, koordinasi, pembinaan administrasi, serta penguatan peran dalam mendukung pelayanan dan pembangunan masyarakat.	Perlu penguatan kelembagaan agar lembaga kemasyarakatan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi mampu menjadi mitra aktif pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.	Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas perannya.
3.4	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan telah direncanakan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat melalui penguatan peran keluarga dan kelembagaan PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan.	Diperlukan peningkatan kapasitas kader dan kelembagaan PKK serta penguatan kegiatan yang mendukung ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga dan partisipasi masyarakat.	Pelaksanaan perlu diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan diselaraskan dengan program prioritas daerah. Perlu menghindari kegiatan yang bersifat seremonial tanpa indikator hasil yang jelas.	Memprioritaskan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas kader, penguatan kelompok PKK, koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi capaian kegiatan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program telah direncanakan	Masih diperlukan upaya pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban	Perlu memperkuat koordinasi dengan Forkopimcam, pemerintah desa dan unsur terkait	Menyusun langkah koordinasi dan pemetaan potensi gangguan trantibum
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan tersedia dalam Ranwal	Diperlukan koordinasi yang berkelanjutan dalam menjaga kondisi wilayah yang kondusif	Target diarahkan pada peningkatan efektivitas koordinasi dan upaya pencegahan gangguan	Melakukan koordinasi rutin dan evaluasi kondisi ketenteraman wilayah
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Telah direncanakan sesuai tugas Kecamatan	Kegiatan tetap diperlukan dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Pelaksanaan perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat	Menyesuaikan target kegiatan dan kebutuhan pendanaan Tahun 2027

5.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila	Kegiatan telah direncanakan	Diperlukan pembinaan masyarakat dalam menjaga persatuan, kerukunan dan ketahanan wilayah	Kegiatan tetap dipertahankan sesuai kebutuhan dan kewenangan Kecamatan	Menyesuaikan sasaran, volume dan target pelaksanaan kegiatan
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program telah tercantum dalam Ranwal sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan pengawasan.	Diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam aspek administrasi pemerintahan, perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, kelembagaan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan secara terencana dan berbasis risiko/permasalahan yang ditemukan pada evaluasi tahun sebelumnya. Fokus diarahkan pada pencegahan kesalahan administrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan desa.	Menyusun jadwal pembinaan dan pengawasan secara berkala, melakukan monitoring dan evaluasi, serta menindaklanjuti hasil pembinaan/pengawasan pada masing-masing desa.
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Telah direncanakan dalam Ranwal	Masih diperlukan pembinaan dan fasilitasi kepada pemerintah desa	Perlu memastikan pelaksanaan pemerintahan desa berjalan tertib, efektif dan sesuai ketentuan	Menyesuaikan target pembinaan dan fasilitasi berdasarkan kebutuhan desa

Berdasarkan hasil reviu Rancangan Awal Renja dan analisis kebutuhan, seluruh program dan kegiatan perlu disempurnakan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap Renstra Kecamatan Kanigoro Tahun 2025–2029, RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, target kinerja Tahun 2027, hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah. Prioritas pendanaan diarahkan pada kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas pemerintahan, koordinasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban umum.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, hasil koordinasi dengan pemerintah desa, aspirasi masyarakat, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelaahan, sebagian besar usulan masyarakat berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pengembangan sistem informasi pelayanan berbasis digital.

Seluruh usulan tersebut dianalisis berdasarkan kewenangan Kecamatan Kanigoro, tingkat urgensi, manfaat bagi masyarakat, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar. Usulan yang menjadi kewenangan perangkat daerah lain akan diteruskan kepada perangkat daerah terkait melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Dengan proses tersebut diharapkan seluruh aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah dan tetap mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2027.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Nama SKPD: Kecamatan Kanigoro

No	Program/Kegiatan Usulan	Lokasi (Desa/Dusun)	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan (Keterangan/Asal Usulan/OPD Tujuan Awal)
Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan					
PP1: PEMERATAAN KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN & PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP					
1	Pembangunan Saluran Drainase	Dusun Ngade Rt 03 Rw 07, Dusun Ngade Rt 01 Rw 08, Dusun Ngade Rt 02 Rw 08, Kab. Blitar	Tersedianya saluran air untuk mengatasi genangan, memperlancar transportasi	Panjang 210 m, lebar 60/40 m, tinggi 60 m	Desa Gogodeso/ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pembangunan Saluran Drainase	Jl Gapuro Agung Dsn Tlogo Iii Rw 01 Dan Rw 02, Kab. Blitar	Tersedianya saluran air untuk mengatasi genangan di Jalan Gapuro Agung	Panjang 600 m, lebar 50 cm drainase berpenutup beton	Desa Tlogo/Dinas PU dan Penataan Ruang
3	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Pertigaan Jalan manukwari menuju jalan mawar. 2. Pertigaan Jl. Manukwari menuju Lingkungan Sembon. 3. perempatan Lingkungan Sembon Kelurahan satreyan , Kab. Blitar	Terpasangnya Lampu Warning Light untuk menghindari kecelakaan lalu lintas karena banyaknya pertigaan dan tingginya mobilitas sebagai jalan alternatif menuju arah malang apabila jalan utama kanigoro ada penutupan jalan	1 Unit	Kelurahan Satreyan/ Dinas Perhubungan
4	Pembangunan Saluran Drainase	Jl. Raya Kuningan RT 1 RW 4, Kab. Blitar	Tersedianya arus aliran air menjadi lancar	Panjang 400 m lebar 60/40 m, tinggi 60 m	Desa Kuningan/ Dinas PU dan Penataan Ruang
PP2: PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN & PENGEMBANGAN HILIRISASI PERTANIAN					
5	NIHIL				
PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN INDUSTRI & UMKM, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF					
6	Bimbingan teknis manajerial Pengembangan Pasar Desa	Pasar Kampung Mudjair, Kab. Blitar	Berkembangnya Pasar Kampung Mudjair sebagai Sentral Belanja Masyarakat	15 Orang	Desa Papungan/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7	Fasilitasi Uji Nutrisi	Rt 03 Rw 11 (Kantor Desa Sawentar), Kab. Blitar	Terjaganya Nutrisi Yang Baik Atas Olahan Makanan Yang Dipasarkan oleh UMKM	20 Produk	Desa Sawentar/Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PP4: PEMBANGUNAN SDM YANG INKLUSIF & PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF					
8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jln Raya Gaprang 1 RT.001 RW.006, Kab. Blitar	Terbangunnya Sarana Prasarana Pendidikan tingkat Anak Usia Dini dengan fasilitas kamar mandi dan wastafel yang memadai sesuai standar	2 Ruang	Desa Gaprang/Dinas Pendidikan
PP5: PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
9	NIHIL				
PROGRAM PENA INTAN					
10	Edukasi bagi Ibu Hamil	Desa Banggle, Kab. Blitar	Teredukasinya ibu hamil dalam memahami tentang prilaku yang harus diperhatikan oleh ibu hamil	60 Orang	Desa Banggle/ Dinas Kesehatan
11	Edukasi bagi Ibu yang memiliki Balita	Desa Kanigoro	Teredukasinya ibu balita dalam memahami tentang peningkatan kapasitas dalam merawat bayi mereka.	180 orang	Desa Jatinom/ Dinas Kesehatan

Blitar, 03 Agustus 2026

Camat Kanigoro



SITI SUPARTIYAH, S.Sos., M.M.

Pembina Tk. I/IV b

NIP. 19681108 198809 2 002

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja 2027 Kecamatan Kanigoro tidak hanya berpedoman pada arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar, tetapi juga memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Hal ini bertujuan agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterpaduan, kesinambungan, dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan secara nasional maupun daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, percepatan transformasi digital, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan tema pembangunan Tahun 2027, yaitu ***"Akselerasi Peningkatan Daya Saing Pertanian yang Berorientasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Didukung Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Berkelanjutan dan Pelayanan Dasar Berkualitas"***. "Tema ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang saling mendukung.

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, Kecamatan Kanigoro berperan dalam mendukung keberhasilan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, penguatan koordinasi lintas sektor, pembinaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Selain itu, Kecamatan Kanigoro juga mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan evaluasi kinerja, penguatan sistem akuntabilitas, peningkatan kualitas pengelolaan data statistik sektoral, serta pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan Kecamatan Kanigoro Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran

pembangunan Kabupaten Blitar sekaligus memberikan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kanigoro serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dan Renstra Kecamatan Kanigoro Tahun 2025–2029, tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, koordinasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Kanigoro secara profesional, efektif, transparan dan akuntabel.

Rumusan tujuan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Blitar “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”, khususnya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dengan cara:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, tepat, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Kanigoro.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, penganggaran, pelaporan, evaluasi, dan pengelolaan data pembangunan.
5. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik.

3.2.2. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Kanigoro.
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi perangkat daerah.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
4. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan wilayah ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Kanigoro.
5. Meningkatnya kualitas fasilitasi, pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat.
6. Meningkatnya kualitas data statistik dan informasi sektoral sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.
7. Meningkatnya kompetensi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
8. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Kanigoro.

Indikator keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui capaian indikator kinerja perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Kanigoro Tahun 2025–2029 dan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2027 dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Kanigoro Tahun 2025–2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89	89.24	89.5	90.5	91
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	62.6	62.9	63	63.25	63.45
1.2		Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	70%	80%	90%	100%	100%
1.3		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	7.36	6.14	4.91	3.68	2.45

Sumber: RPJMD Kab.Blitar 2025-2029 dan Renstra Kec. Kanigoro (data diolah)

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Kanigoro Tahun 2027 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, hasil Musrenbang, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Fokus pelaksanaan program diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan koordinasi pembangunan wilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Secara umum pelaksanaan program Tahun 2027 mempertimbangkan beberapa faktor berikut:

- Kesesuaian dengan visi dan misi Bupati Blitar.
- Dukungan terhadap tema pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2027.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Penguatan reformasi birokrasi.
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan.
- Efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- Peningkatan kualitas data pembangunan dan statistik sektoral.

3.3.1. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Kanigoro Tahun 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Blitar, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Perumusan program dan kegiatan juga memperhatikan tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar

Program dan kegiatan Kecamatan Kanigoro diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Blitar melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,

pelayanan publik yang semakin baik, serta peningkatan koordinasi pembangunan wilayah. Kecamatan sebagai perangkat daerah kewilayahan memiliki peran strategis dalam menghubungkan kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

b. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

Program yang disusun juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, pelayanan publik yang inklusif, pembangunan desa yang berkelanjutan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta kemitraan dalam pembangunan.

c. Mendukung upaya penanggulangan kemiskinan

Walaupun Kecamatan Kanigoro bukan perangkat daerah teknis yang menangani kemiskinan secara langsung, pelaksanaan koordinasi pembangunan, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan desa, serta pelaksanaan Musrenbang merupakan bagian dari upaya mendukung program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

d. Mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelaksanaan program Kecamatan Kanigoro diarahkan untuk mendukung perangkat daerah teknis dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal melalui koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi pelayanan kepada masyarakat, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul di wilayah kecamatan.

e. Pendayagunaan potensi daerah

Rumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan potensi wilayah Kecamatan Kanigoro sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Blitar yang memiliki perkembangan aktivitas pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, program diarahkan pada peningkatan kualitas koordinasi pembangunan wilayah dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

f. Dukungan terhadap percepatan penanganan stunting

Kecamatan Kanigoro mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting melalui koordinasi lintas sektor bersama pemerintah desa, Puskesmas, kader kesehatan, PKK, dan perangkat daerah terkait. Dukungan tersebut diwujudkan melalui fasilitasi pelaksanaan program konvergensi stunting di tingkat kecamatan dan desa.

g. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar target program dan kegiatan telah tercapai dengan baik. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan data sektoral, serta peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan program Tahun 2027.

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Adapun program yang akan dilaksanakan berdasarkan KISS RKPD Tahun 2027 dan hasil penyusunan Renja 2027 Kecamatan Kanigoro, direncanakan pelaksanaan 6 program yang dijabarkan ke dalam 12 kegiatan dan 26 subkegiatan sesuai nomenklatur SIPD meliputi:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Tahun 2027 diarahkan untuk:

- meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- mempercepat proses pelayanan administrasi;
- meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran;
- memperkuat koordinasi pembangunan wilayah;
- meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- mendukung transformasi digital pemerintahan;
- mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan Kecamatan Kanigoro mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2027, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kanigoro Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN KANIGORO KAB. BLITAR TAHUN 2027																	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Kecamatan Kanigoro						4.387.547.800,00								4.482.535.873,88	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.387.547.800,00								4.482.535.873,88	
	7.01	KECAMATAN						4.387.547.800,00								4.482.535.873,88	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.621.099.880,00								4.013.997.555,88	
		Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran perangkat daerah (Kecamatan Kanigoro)						3.619.099.880,00								4.013.997.555,88	
			1. Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	94 %		90 %	91 %	3.619.099.880,00							92 %	4.013.997.555,88	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.610.000,00						-		7.023.035,00	
		Tetelaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						6.610.000,00						-		7.023.035,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00							1 Dokumen	2.205.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	2.010.000,00							20 Dokumen	2.271.260,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	2.600.000,00							6 Laporan	2.546.775,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.010.000,00					4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			2.271.260,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	2.010.000,00	Kab. Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Dokumen	2.271.260,00	Kecamatan Kanigoro

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.600.000,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			2.546.775,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	2.600.000,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Laporan	2.546.775,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						2.000.000,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			2.205.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	2.205.000,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.060.146.800,00						-		3.114.873.521,88	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.060.146.800,00						-		3.114.873.521,88	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	2.000.000,00							20 Dokumen	291.008,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	40.860.000,00							20 Dokumen	70.623.220,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.017.286.800,00							25 Orang/bulan	3.043.959.293,88	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.017.286.800,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			3.043.959.293,88	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.017.286.800,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					25 Orang/bulan	3.043.959.293,88	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						40.860.000,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			70.623.220,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	40.860.000,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Dokumen	70.623.220,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						2.000.000,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			291.008,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Dokumen	291.008,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						30.998.600,00						-		186.465.294,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						30.998.600,00						-		186.465.294,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.000.850,00							12 Laporan	74.563.882,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.460.400,00							1 Paket	1.653.750,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.783.550,00							2 Paket	23.208.154,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.006.100,00							1 Paket	19.847.249,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.251.000,00							1 Paket	41.397.596,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.496.700,00							1 Paket	25.794.663,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.006.100,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENERAPAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			19.847.249,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.006.100,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	19.847.249,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.251.000,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENERAPAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			41.397.596,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.251.000,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	41.397.596,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.496.700,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENERAPAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			25.794.663,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.496.700,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	25.794.663,00	Kecamatan Kanigoro

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.460.400,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan Harmoni Sosial			1.653.750,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.460.400,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	1.653.750,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						2.783.550,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan Harmoni Sosial			23.208.154,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.783.550,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Paket	23.208.154,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						11.000.850,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan Harmoni Sosial			74.563.882,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.000.850,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	74.563.882,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00						-		165.375.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00						-		165.375.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00							1 Unit	55.125.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	0,00							8 Unit	110.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00			-	-	-			110.250.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Unit	110.250.000,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			55.125.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	55.125.000,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						479.972.880,00						-		417.015.262,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						479.972.880,00						-		417.015.262,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	46.800.000,00							12 Laporan	29.513.024,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	433.172.880,00							12 Laporan	381.281.161,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00							3 Laporan	6.221.077,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			6.221.077,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	6.221.077,00	Kecamatan Kanigoro

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						46.800.000,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			29.513.024,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	46.800.000,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	29.513.024,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						433.172.880,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			381.281.161,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	433.172.880,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	381.281.161,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43.371.600,00						-		123.245.443,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43.371.600,00						-		123.245.443,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00							1 Unit	49.612.500,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	35.861.600,00							13 Unit	51.716.897,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00							5 Unit	5.512.500,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit		23 Unit	23 Unit	7.510.000,00							23 Unit	16.403.546,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						35.861.600,00			-	-	-			51.716.897,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	35.861.600,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Unit	51.716.897,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00			-	-	-			5.512.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	5.512.500,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.510.000,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			16.403.546,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit		23 Unit	23 Unit	7.510.000,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					23 Unit	16.403.546,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			49.612.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	49.612.500,00	Kecamatan Kanigoro
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3.500.000,00								52.624.558,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Kanigoro)						3.500.000,00								52.624.558,00	
			1.persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik	100 %		100 %	100 %	3.500.000,00							100 %	52.624.558,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.500.000,00						-		14.470.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.500.000,00						-		14.470.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00							1 Laporan	14.470.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						3.500.000,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			14.470.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	14.470.000,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						0,00						-		28.500.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						0,00						-		28.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00							12 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00							3 Laporan	14.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00							4 Laporan	8.500.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						0,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	5.500.000,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						0,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			14.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	14.500.000,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			8.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	8.500.000,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0,00						-		9.654.558,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						0,00						-		9.654.558,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	0,00							15 Laporan	9.654.558,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						0,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			9.654.558,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Laporan	9.654.558,00	Kecamatan Kanigoro
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						15.989.920,00								297.523.890,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Kanigoro)						15.989.920,00								179.361.945,00	
			1.persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %		100 %	100 %	15.989.920,00							100 %	179.361.945,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						9.996.920,00						-		22.000.000,00	
		Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa						9.996.920,00						-		22.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakan		12 Lembaga Kemasyarakan	12 Lembaga Kemasyarakan	9.996.920,00							12 Lembaga Kemasyarakan	22.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						9.996.920,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			22.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakan		12 Lembaga Kemasyarakan	12 Lembaga Kemasyarakan	9.996.920,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Lembaga Kemasyarakan	22.000.000,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0,00						-		236.323.890,00	
		Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0,00						-		236.323.890,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00							4 Pokmas / Ormas	118.161.945,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	0,00							4 Unit	118.161.945,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00			-	-	3. PERCEPATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN			118.161.945,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	118.161.945,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						0,00			-	-	2. PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DAN DAYA SAING KOMODITAS UNGGULAN DAERAH			118.161.945,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Pokmas / Ormas	118.161.945,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						450.000,00						-		13.200.000,00	
		Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						450.000,00						-		13.200.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	450.000,00							12 Laporan	2.200.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	0,00							12 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			11.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						450.000,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			2.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	450.000,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	2.200.000,00	Kecamatan Kanigoro

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						5.543.000,00						-		26.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						5.543.000,00						-		26.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga		50 Keluarga	50 Keluarga	5.543.000,00							50 Keluarga	26.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						5.543.000,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			26.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga		50 Keluarga	50 Keluarga	5.543.000,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					50 Keluarga	26.000.000,00	Kecamatan Kanigoro
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13.187.000,00								60.060.178,00	
		Terpenuhinya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Kanigoro)						13.187.000,00								60.060.178,00	
			1.Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %		100 %	100 %	13.187.000,00							100 %	60.060.178,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13.187.000,00						-		56.100.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13.187.000,00						-		56.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	13.187.000,00							6 Laporan	49.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	0,00							6 Laporan	7.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						13.187.000,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			49.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	13.187.000,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Laporan	49.000.000,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			7.100.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Laporan	7.100.000,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00								3.960.178,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00								3.960.178,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	0,00							6 Laporan	3.960.178,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			3.960.178,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Laporan	3.960.178,00	Kecamatan Kanigoro
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						5.000.000,00								25.679.706,00	
		Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Kanigoro)						5.000.000,00								25.679.706,00	
			1.Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %		100 %	100 %	5.000.000,00							100 %	25.679.706,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						5.000.000,00					-			25.679.706,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						5.000.000,00					-			25.679.706,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.160.000,00							12 Dokumen	2.756.250,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.690.000,00							12 Laporan	3.307.500,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.150.000,00							100 Orang	19.615.956,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						1.150.000,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			19.615.956,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.150.000,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Orang	19.615.956,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						1.690.000,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			3.307.500,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.690.000,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	3.307.500,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						2.160.000,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			2.756.250,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.160.000,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	2.756.250,00	Kecamatan Kanigoro
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						728.771.000,00								32.649.986,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa (Kecamatan Kanigoro)						728.771.000,00								30.427.346,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	728.771.000,00							100 %	30.427.346,00	
			2.Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	728.771.000,00							100 %	30.427.346,00	
			3.Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	728.771.000,00							100 %	30.427.346,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						728.771.000,00						-		32.649.986,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						728.771.000,00						-		32.649.986,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		1 Dokumen	8 Dokumen	725.261.000,00							0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	0,00							10 Dokumen	7.524.563,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	0,00							20 Dokumen	8.286.844,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00							0 Dokumen	2.116.800,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	0,00							10 Dokumen	2.697.499,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	0,00							20 Dokumen	4.615.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00							0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	3.510.000,00							10 Dokumen	1.764.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	0,00							20 Dokumen	2.222.640,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	0,00							20 Dokumen	2.222.640,00	
	7.01.06.2.01.0001	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						0,00					4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			2.222.640,00	
		Terlaksananya Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Dokumen	2.222.640,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.06.2.01.0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						3.510.000,00					4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			1.764.000,00	
		Terlaksananya Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	3.510.000,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Dokumen	1.764.000,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.06.2.01.0003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00					4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			2.222.640,00	
		Terlaksananya Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Dokumen	2.222.640,00	Kecamatan Kanigoro

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Dokumen	4.615.000,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						0,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					0 Dokumen	0,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						0,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			1.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	1.200.000,00	Kecamatan Kanigoro
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						0,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			2.116.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Bitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					0 Dokumen	2.116.800,00	Kecamatan Kanigoro

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.06.2.01.0016	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						0,00			-	-	4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA Penguatan HARMONI SOSIAL			2.697.499,00	
		Tertaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Kab. Blitar	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Dokumen	2.697.499,00	Kecamatan Kanigoro
		J U M L A H						4.387.547.800,00							4.482.535.873,88		

Blitar, 03 Agustus 2026

Camat Kanigoro



SITI SUPARTIYAH, S.Sos., M.M.

Pembina Tk. I/IV b

NIP. 19681108 198809 2 002

3.3.3 Kesesuaian dengan Rancangan Awal RKPD

Secara umum, rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Kanigoro Tahun 2027 telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2027. Penyesuaian yang dilakukan lebih bersifat penyempurnaan terhadap indikator kinerja, target, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif berdasarkan hasil pembahasan forum perangkat daerah, Musrenbang, serta sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Apabila terdapat perubahan pagu anggaran, perubahan nomenklatur subkegiatan, maupun penyesuaian target kinerja, perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian tersebut tidak mengubah tujuan utama pelaksanaan program, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembinaan masyarakat di wilayah Kecamatan Kanigoro.

3.3.4 Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Pada bagian ini disajikan Tabel Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2027 yang disusun sesuai format SIPD dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Renja 2027 Kecamatan Kanigoro. Tabel ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kanigoro Tahun Anggaran 2027 serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2027 Dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Kecamatan Kanigoro

Lembar : 1 dari 3

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kec. Kanigoro	91%	3.621.099.880,00	DAU		91%	4.013.997.555,88
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kanigoro	20 Kegiatan	6.610.000,00	DAU		20 Kegiatan	7.023.035,00
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kanigoro	88 Kegiatan	3.060.146.800,00	DAU		88 Kegiatan	3.114.873.521,88
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kanigoro	30 Kegiatan	30.998.600,00	DAU		30 Kegiatan	186.465.294,00
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kanigoro	27 Kegiatan	479.972.880,00	DAU		27 Kegiatan	417.015.262,00
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kec. Kanigoro	42 Kegiatan	43.371.600,00	DAU		42 Kegiatan	123.245.443,00
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik	Kec. Kanigoro	100%	3.500.000,00	DAU		100%	52.624.558,00
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kanigoro	1 Kegiatan	3.500.000,00	DAU		1 Kegiatan	14.470.000,00
7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase fasilitasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec. Kanigoro	100%	1.902.516.000,00	DAU		100%	297.523.890,00
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kanigoro	12 Kegiatan	9.996.920,00	DAU		12 Kegiatan	22.000.000,00
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Kanigoro	8 Kegiatan	1.200.000.000,00	DAU		8 Kegiatan	236.323.890,00
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terkoordinasinya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Kanigoro	24 Kegiatan	450.000,00	DAU		24 Kegiatan	13.200.000,00
7	01	03	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Kanigoro	12 Kegiatan	5.543.000,00	DAU		12 Kegiatan	26.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentasegangguan tranitibum yang terselesaikan	Kec. Kanigoro	100%	13.187.000,00	DAU		100%	60.060.178,00
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kanigoro	12 Kegiatan	13.187.000,00	DAU		12 Kegiatan	56.100.000,00
7	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentasefasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec. Kanigoro	100%	5.000.000,00	DAU		100%	25.679.706,00
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kanigoro	24 Kegiatan	5.000.000,00	DAU		24 Kegiatan	25.679.706,00
7	01	06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PersentaseDesa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu PersentaseDesa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu PersentaseDesa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Kec. Kanigoro	100% 100% 100%	728.771.000,00	DAU		100% 100% 100%	32.649.986,00
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kanigoro	10 Kegiatan	728.771.000,00	DAU		10 Kegiatan	32.649.986,00

Sumber: SIPD Penganggaran 2027 Kec. Kanigoro

Blitar, 03 Agustus 2026
Camat Kanigoro

SITI SUPARTIYAH, S.Sos., M.M.

Pembina Tk. I/IV b
NIP. 19681108 198809 2 002

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027

Rencana Kerja Kecamatan Kanigoro Tahun 2027 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Seluruh program dan kegiatan disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2027, Renstra Kecamatan Kanigoro Tahun 2025–2029, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta usulan kebutuhan yang berkembang di wilayah Kecamatan Kanigoro.

Penyusunan rencana kerja juga memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan sehingga setiap anggaran yang dialokasikan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Program dan kegiatan Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, koordinasi pembangunan wilayah, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja.

Selain mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, seluruh program juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa, perangkat daerah terkait, instansi vertikal, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Blitar.

4.2. Prioritas Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil perencanaan, prioritas pelaksanaan program Kecamatan Kanigoro Tahun 2027 meliputi beberapa kelompok kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini menjadi prioritas utama karena berfungsi mendukung seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kanigoro. Melalui program ini diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kecamatan Kanigoro terus meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan,

penganggaran, pelaporan, serta evaluasi kinerja sehingga seluruh pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Penguatan akuntabilitas juga dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga setiap kendala dapat segera ditindaklanjuti.

Program ini merupakan program utama yang mendukung kelancaran seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kanigoro. Pada Tahun 2027 program ini tetap diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas administrasi, akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta pelayanan administrasi perkantoran.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Subkegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
- 4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 6) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 11) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 13) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 14) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 15) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 16) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pelaksanaan subkegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan, kualitas data pembangunan, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas utama Kecamatan Kanigoro. Berbagai upaya dilakukan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. Pelayanan yang diberikan diharapkan mampu memenuhi prinsip cepat, mudah, transparan, pasti, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan

Subkegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Pelaksanaan program diarahkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan sesuai standar pelayanan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kecamatan Kanigoro terus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, serta instansi vertikal dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan koordinasi dilakukan secara berkelanjutan melalui rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, pembinaan desa, fasilitasi penyelesaian permasalahan wilayah, serta pendampingan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Subkegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 4) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 5) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat

Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan. Pelaksanaan program dilakukan melalui fasilitasi Musrenbang Kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan efektivitas pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Satreyan dan Kelurahan Kanigoro.

D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan untuk meningkatkan stabilitas wilayah melalui koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Subkegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama unsur Forkopimcam, Satpol PP, pemerintah desa, serta instansi terkait.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini dilaksanakan dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah, meningkatkan kerukunan masyarakat, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
- 2) Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, pembinaan administrasi desa, monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi/Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 2) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

4.3. Pendanaan Program dan Kegiatan

Pendanaan seluruh program dan kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027 sesuai pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Blitar. Alokasi anggaran diarahkan pada kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung terhadap

peningkatan pelayanan publik, kualitas tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan pemerintahan desa.

Pendanaan Rencana Kerja Kecamatan Kanigoro Tahun 2027 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar sesuai kemampuan keuangan daerah.

Besaran pagu anggaran setiap program, kegiatan, dan subkegiatan disusun berdasarkan hasil pembahasan KISS RKPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta kemampuan fiskal daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan prioritas pembangunan.

Pengalokasian anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah melalui pembiayaan kegiatan yang memiliki manfaat langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran akan mengedepankan prinsip:

- tepat sasaran;
- tepat waktu;
- tepat manfaat;
- tertib administrasi;
- transparan;
- akuntabel;
- efisien;
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4. Indikator Kinerja Program

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2027, Kecamatan Kanigoro menetapkan beberapa indikator kinerja, antara lain:

- meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah;
- meningkatnya kualitas dokumen penganggaran;
- meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah;
- meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik sektoral;
- meningkatnya kualitas administrasi keuangan;
- meningkatnya kualitas administrasi umum;
- meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;

- meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Kanigoro;
- meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Seluruh indikator tersebut akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala sebagai bahan penyusunan laporan kinerja serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.5. Harapan Pelaksanaan Program Tahun 2027

Melalui pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan, Kecamatan Kanigoro diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan koordinasi pembangunan wilayah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2027.

Pelaksanaan program juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan kecamatan yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, maupun masyarakat, pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kanigoro Tahun 2027 diharapkan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Kecamatan Kanigoro.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Kanigoro Tahun 2027 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026, arah kebijakan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2027, serta target Renstra Kecamatan Kanigoro Tahun 2025–2029. Seluruh program diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa, dan penguatan tata kelola perangkat daerah.

Program yang menjadi prioritas adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, karena mendukung seluruh proses administrasi, perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor. Selain itu, Kecamatan Kanigoro juga melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pembinaan terhadap pemerintah desa.

Seluruh program dan kegiatan tersebut direncanakan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Blitar dan pelaksanaannya disesuaikan dengan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2027. Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan target kinerja Kecamatan Kanigoro dapat tercapai secara optimal serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi sebagai penutup dokumen Renja 2027PD Kecamatan Kanigoro Tahun 2027. Didalamnya diuraikan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait pelaksanaan Renja dan kondisi apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut untuk memastikan implementasi Renja PD ini dapat berjalan dengan efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

5.1. Catatan penting

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kanigoro Tahun 2027 terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal:

1. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil.
2. Pelaksanaan Renja harus tetap mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kanigoro Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2027, serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Koordinasi dan sinergi antara Kecamatan Kanigoro, perangkat daerah terkait, pemerintah desa/kelurahan, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan secara berkala sebagai dasar untuk mengidentifikasi hambatan, melakukan perbaikan, serta memastikan pencapaian indikator kinerja sesuai target.

5. Apabila pada pelaksanaannya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan atau terjadi penyesuaian kemampuan keuangan daerah, maka pelaksanaan program dan kegiatan akan diprioritaskan pada kegiatan yang bersifat wajib, mendukung pelayanan dasar, serta memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Kanigoro. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui rasionalisasi anggaran, perubahan target kinerja, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, atau mekanisme perubahan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perubahan regulasi, atau kondisi yang memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan, maka Renja Kecamatan Kanigoro akan disesuaikan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Dengan adanya komitmen seluruh aparatur Kecamatan Kanigoro serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Blitar dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2027 dapat berjalan secara efektif dan mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kanigoro.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

1. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan Renja menjadi dasar penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Kanigoro Tahun Anggaran 2027.
3. Setiap pelaksanaan kegiatan wajib memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
4. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sebagai bahan perbaikan kinerja perangkat daerah.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan nasional maupun daerah, penyesuaian Renja akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Menyusun RKA Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Renja yang telah ditetapkan.
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai target kinerja.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala.
5. Menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Renja 2027 Kecamatan Kanigoro diharapkan dapat menjadi pedoman kerja bagi seluruh aparatur Kecamatan Kanigoro dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Blitar yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Blitar, 03 Agustus 2026

Camat Kanigoro



SITI SUPARTIYAH, S.Sos., M.M.

Pembina Tk. I/IV b

NIP. 19681108 198809 2 002